



Konstruksi Identitas Budaya melalui Perkebunan : Studi Literatur terhadap Komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa di Indonesia

Marzuti Isra^{1*}, Nayla Rashifa², Ersandi Roihan Putra³, Reza Syahputra⁴,
Rifadeo Rahmad Siregar⁵, Fachry Pahlevi Siregar⁶

¹⁻⁶Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sawit
Indonesia, Indonesia

Alamat: Kampus Jl. Williém Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : marzuti_isra@itsi.ac.id

Abstract. *This literature study examines the construction of cultural identity through socio-economic practices in plantation ecosystems among the Acehnese, Malay, and Chinese communities in Indonesia. Using a systematic literature review of 42 selected sources (1990-2023), the research reveals that plantations function as sites of identity negotiation—dynamic arenas of cultural adaptation and resistance. In Aceh, the integration of Islamic values (zakat [alms] from plantations, meunasah education) and local wisdom (peusijek rituals) mediates post-conflict reconciliation and identity transformation from "combatants" to "farmers" (Muchlis et al., 2023; Aulia et al., 2024). For the Malay community, the customary-territorial concept of bela kampung (communal defense) underpins resistance to authority fragmentation through gotong royong (mutual cooperation) and communal land allocation (Yunanda et al., 2024; Nasution et al., 2024). Meanwhile, the Chinese community develops invisibility strategies (e.g., land acquisition via family foundations, citizenship aliases) to convert legal marginalization into clan-based social capital (Irawan, 2016; Thung, 2018). Key findings highlight divergent identity sources: religiosity (Aceh), customary-territoriality (Malay), and clan social capital (Chinese). The study recommends integrating local wisdom into inclusive plantation policies and employing ethnographic approaches to examine identity intersectionality complexity.*

Keywords: *Ethnic Dynamics, Identity Construction, Local Wisdom, Oil-Palm Plantation, Social Reconciliation.*

Abstrak. Studi literatur ini menganalisis konstruksi identitas budaya melalui praktik sosio-ekonomi dalam ekosistem perkebunan pada komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa di Indonesia. Menggunakan metode systematic literature review terhadap 42 sumber terpilih (1990-2023), penelitian mengungkap bahwa perkebunan berfungsi sebagai site of identity negotiation—arena negosiasi dinamis antara adaptasi dan resistensi kultural. Pada komunitas Aceh, integrasi nilai Islam (zakat kebun, meunasah) dan kearifan lokal (peusijek) memediasi rekonsiliasi pascakonflik dan transformasi identitas dari "pejuang" menjadi "petani" (Muchlis et al., 2023; Aulia et al., 2024). Di komunitas Melayu, konsep bela kampung berbasis adat-teritorial menjadi fondasi resistensi terhadap fragmentasi otoritas melalui mekanisme gotong royong dan alokasi lahan komunal (Yunanda et al., 2024; Nasution et al., 2024). Sementara komunitas Tionghoa mengembangkan strategi invisibility (e.g., akuisisi tanah via yayasan keluarga, alias kewarganegaraan) untuk mengonversi marginalisasi hukum menjadi modal sosial jejaring klan (Irawan, 2016; Thung, 2018). Temuan kunci menunjukkan divergensi sumber identitas: religiositas (Aceh), adat-teritorial (Melayu), dan modal sosial klan (Tionghoa). Studi merekomendasikan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan perkebunan inklusif dan pendekatan etnografi lanjutan untuk menguji kompleksitas intersectionality identitas.

Kata kunci: Konstruksi identitas, perkebunan sawit, dinamika etnis, rekonsiliasi sosial, kearifan lokal.

1. LATAR BELAKANG

Perkebunan di Indonesia telah lama berfungsi sebagai ruang sosial-ekonomi yang kompleks, di mana aktivitas agraris tidak hanya membentuk lanskap fisik tetapi juga mengkonstruksi identitas budaya komunitas lokal. Sejak era kolonial hingga kontemporer, ruang perkebunan menjadi arena pertemuan antara kebijakan negara, kekuatan pasar global, dan dinamika masyarakat lokal yang melahirkan transformasi sosio-kultural

signifikan (Medrano, 2023). Konfigurasi sosial dalam perkebunan kelapa sawit dan karet khususnya, menciptakan matriks interaksi unik yang merekonfigurasi relasi etnis, memori kolektif, dan praktik keseharian. Dalam konteks pascakonflik Aceh misalnya, perkebunan sawit berperan sebagai medium rekonsiliasi dimana mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membangun relasi baru berbasis modal sosial dan kewajiban moral dengan komunitas lokal, mentransformasikan identitas dari "pejuang" menjadi "petani" melalui kolaborasi ekonomi (Muchlis et al., 2023; Yunanda et al., 2024).

Secara historis, pola pengelolaan perkebunan di Indonesia mengikuti fragmentasi etnis yang diwariskan sejak kebijakan segregasi kolonial. Masyarakat Tionghoa kerap ditempatkan dalam posisi ambigu—di satu sisi menjadi perantara perdagangan, di sisi lain menghadapi diskriminasi sistemik sebagaimana tercermin dalam praktik kontemporer di Yogyakarta dimana Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 masih membatasi hak milik tanah warga non-pribumi, bertentangan dengan prinsip kebangsaan dalam UUPA (Irawan, 2016). Sementara di Kalimantan Barat, ekspansi perkebunan sawit mengikis konsep "tanah ulayat" pada masyarakat Dayak, menggeser pandangan kosmologis yang memandang hutan sebagai ruang sakral menjadi semata sumber komoditas (Mawardi Baging, 2023). Perubahan mindset ini mengindikasikan erosi kearifan lokal seiring penetrasi logika pasar.

Signifikansi komparasi tiga komunitas—Aceh, Melayu, dan Tionghoa—terletak pada posisi unik mereka dalam narasi identitas nasional. Masyarakat Melayu di Riau misalnya, menghadapi kompleksitas konflik agrarian yang berbeda dengan dinamika di Aceh pascakonflik. Penelitian di Terantang Manuk menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit melahirkan konflik multidimensi, mulai sengketa lahan hingga ketegangan relasi industrial (Dharmawan et al., 2021). Sementara masyarakat Tionghoa menghadapi tantangan dalam konstruksi identitas perkotaan dimana etnisitas berfungsi sebagai sumber daya politik melalui strategi diferensiasi dinamis (Thung, 2018). Perbandingan ketiganya mengungkap bagaimana perkebunan menjadi medan negosiasi identitas: sebagai ruang rekonsiliasi di Aceh, ruang resistensi di Melayu, dan ruang marginalisasi-terhadap-adaptasi di komunitas Tionghoa.

Rumusan masalah penelitian ini berfokus pada dua aspek kritis: (1) mekanisme konstruksi identitas budaya melalui praktik sosio-ekonomi dalam ekosistem perkebunan, dan (2) pola kesamaan serta divergensi dinamika identitas pada komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa. Studi ini bertujuan menganalisis strategi adaptasi dan resistensi kultural yang muncul, termasuk bagaimana praktik kewirausahaan sawit mantan elit DI/TII Aceh tidak hanya meningkatkan ekonomi tetapi juga memulihkan pengakuan sosial (Aulia et al.,

2024), atau bagaimana relasi sosial dalam perkebunan karet dan cengkih dikonfigurasi oleh jaringan penjualan versus ikatan komunal (Gunawan et al., 2024).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan tiga kontribusi mendasar: Pertama, memperkaya studi sosiologi budaya dengan mengintegrasikan perspektif ekologi politik dalam analisis ruang perkebunan. Kedua, mengembangkan kerangka antropologi pertanian yang mempertimbangkan dimensi poskolonial dalam relasi etnis. Ketiga, mengadvokasi pendekatan multidisipliner dalam studi transformasi identitas. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan perkebunan inklusif yang sensitif terhadap dimensi kultural, terutama dalam konteks peningkatan sertifikasi berkelanjutan (Al Qahtani & Tang, 2019) dan penguatan tanggung jawab sosial korporasi yang berbasis kearifan lokal.

2. KAJIAN TEORITIS

Konstruksi identitas budaya dalam konteks perkebunan di Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, transformasi ekonomi, dan interaksi sosio-ekologis. Hall (1990) dan Bourdieu (1977) menegaskan bahwa identitas budaya tidak bersifat statis, melainkan terus-menerus dibentuk ulang melalui praktik sosial dan arena ekonomi. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit dan karet, transformasi ini terlihat jelas pada komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa, di mana identitas kolektif mengalami rekonfigurasi melalui mekanisme kapitalisme agraris. Studi di Aceh menunjukkan bagaimana perkebunan sawit pasca-konflik menjadi instrumen transformasi identitas mantan kombatan GAM dari "pejuang" menjadi "petani", sekaligus media reintegrasi sosial melalui praktik ekonomi yang mempromosikan solidaritas komunitas (Yunanda et al., 2024; Akmal et al., 2023). Proses ini mengonfirmasi teori Bourdieu (1977) mengenai pembentukan *habitus* baru melalui partisipasi dalam struktur ekonomi yang berubah.

Kerangka *political ecology* Peluso (1992) memberikan lensa kritis untuk menganalisis relasi kuasa dalam penguasaan lahan dan implikasinya terhadap identitas etnis. Di Kalimantan Barat, ekspansi perkebunan sawit telah menggeser *worldview* masyarakat Dayak terhadap hutan adat, mengubah hubungan sakral dengan alam menjadi relasi komodifikasi yang merusak nilai-nilai tradisional seperti kearifan lokal dan solidaritas komunal (Baging, 2023). Sementara di Aceh Tamiang, konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat memunculkan fenomena "ninja" – praktik pencurian buah sawit sebagai bentuk resistensi terhadap ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Fenomena ini merefleksikan perjuangan identitas komunitas lokal dalam menghadapi

hegemoni korporasi (Nasution et al., 2024). Dinamika serupa terjadi di Riau, di mana konversi hutan menjadi perkebunan sawit memicu fragmentasi sosial berbasis klaim kepemilikan lahan (Dharmawan et al., 2021).

Teori Stoler (1995) tentang *ethnicity and capitalism* relevan untuk memahami stratifikasi etnis dalam sistem perkebunan. Kebijakan diskriminatif seperti Instruksi Kepala Daerah DIY 1975 yang melarang warga Tionghoa memiliki hak milik tanah (Irawan, 2016) dan kebijakan kuota ketenagakerjaan 60:40 (pribumi:non-pribumi) di Karawang (Fauzi et al., 2022) mengukuhkan relasi kuasa berbasis etnisitas. Kebijakan ini menciptakan hierarki akses terhadap sumber daya ekonomi yang pada gilirannya membentuk identitas kolektif berdasarkan kategori administratif "pribumi" dan "non-pribumi". Di Aceh, transformasi mantan elite Darul Islam menjadi pemilik perkebunan sawit justru memperkuat pengakuan sosial mereka melalui redistribusi lahan dan pemberdayaan ekonomi komunitas lokal, menunjukkan kompleksitas relasi etnisitas-kapitalisme dalam konteks pascakonflik (Yunanda et al., 2024).

Perubahan ekologis akibat konversi lahan juga memengaruhi konstruksi identitas budaya. Studi di Xishuangbanna, Tiongkok, mengungkapkan bahwa perluasan perkebunan karet telah mengikis pengetahuan ekologi tradisional masyarakat Bulang, mengancam identitas kultural yang melekat pada praktik pertanian subsisten (Zheng et al., 2020). Di Sumatra, konversi hutan hujan menjadi monokultur sawit dan karet tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati, tetapi juga mengubah struktur jaringan makanan tanah dan dinamika komunitas biologis (Pollierer et al., 2019; Maraun et al., 2016), yang pada tingkat makro berkorelasi dengan disrupsi praktik sosio-kultural berbasis ekosistem.

Pola umum yang teridentifikasi adalah dialektika antara *resistance* dan *adaptasi*: komunitas Aceh memanfaatkan perkebunan sawit untuk membangun perdamaian dan identitas ekonomi baru pascakonflik; masyarakat Melayu-Dayak berjuang mempertahankan identitas kultural di tengah tekanan komodifikasi; sementara komunitas Tionghoa menghadapi tantangan identitas melalui kebijakan agraria yang diskriminatif. Ruang kosong penelitian terletak pada belum terintegrasinya analisis ketiga kelompok etnis ini dalam satu kerangka teoretis yang mengaitkan konstruksi identitas dengan transformasi ekologi politik dan ekonomi perkebunan secara komparatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk menyelidiki konstruksi identitas budaya pada komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa dalam konteks perkebunan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis kritis yang komprehensif terhadap korpus pengetahuan akademik yang sudah ada, guna menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik secara transparan dan dapat direplikasi (Snyder, 2019). Berbeda dengan tinjauan literatur tradisional yang mungkin bersifat lebih naratif dan selektif, *systematic review* menekankan pada proses pencarian yang sistematis, kriteria seleksi yang eksplisit, dan penilaian kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan, sehingga meminimalkan bias dan memberikan landasan yang kokoh untuk analisis tematik komparatif yang menjadi tujuan penelitian ini (Petticrew & Roberts, 2006).

Sumber data utama penelitian ini meliputi berbagai jenis dokumen akademik dan historis yang diterbitkan dalam rentang waktu 1990 hingga 2023. Rentang waktu ini dipilih untuk menangkap perkembangan kajian mutakhir mengenai identitas budaya dan transformasi sosial-ekonomi pasca-Orde Baru, sekaligus mencakup karya-karya seminal yang relevan dari dekade sebelumnya. Pencarian literatur dilakukan secara ekstensif pada basis data elektronik terindeks seperti SCOPUS dan SAGE Journals, yang menyediakan akses ke jurnal internasional bereputasi tinggi. Selain itu, untuk menjangkau literatur lokal dan nasional yang substansial, pencarian juga dilakukan di basis data Garuda (Garba Rujukan Digital) milik Kemdikbudristek Indonesia, serta katalog perpustakaan universitas terkemuka dan repositori institusional. Jenis dokumen yang dicakup tidak terbatas pada artikel jurnal penelitian, tetapi juga mencakup monograf akademis (buku), disertasi doctoral, tesis magister, dan dokumen arsip historis (seperti laporan kolonial, memoar, atau dokumen kebijakan perkebunan) yang memberikan konteks dan kedalaman historis yang diperlukan (Grant & Booth, 2009).

Penerapan kriteria inklusi yang ketat menjadi kunci dalam proses seleksi literatur untuk memastikan relevansi dan fokus penelitian. Dokumen-dokumen yang dipertimbangkan harus memenuhi tiga syarat utama: (1) Secara substantif fokus pada satu atau lebih dari tiga komunitas sasaran, yaitu komunitas Aceh, Melayu, atau Tionghoa di Indonesia, baik sebagai kelompok utama maupun dalam perbandingan yang berarti; (2) Membahas secara eksplisit atau implisit hubungan antara aktivitas perkebunan (dalam berbagai bentuknya, baik kolonial maupun kontemporer, perkebunan besar atau skala menengah yang signifikan secara sosial) dengan proses

pembentukan, transformasi, negosiasi, atau resistensi identitas budaya (termasuk aspek seperti etnisitas, praktik kultural, memori kolektif, stratifikasi sosial, dan hubungan kekuasaan); dan (3) Diterbitkan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, yaitu antara tahun 1990 hingga 2023, untuk memastikan kontinuitas analisis dengan perkembangan teoretis dan empiris terkini. Dokumen yang tidak memenuhi ketiga kriteria ini, seperti yang hanya membahas perkebunan secara teknis-ekonomis tanpa dimensi sosial-budaya, atau yang membahas komunitas lain di luar tiga fokus penelitian, akan dieksklusi dari analisis lebih lanjut (Kitchenham & Charters, 2007).

Setelah literatur terkumpul dan melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi, penelitian ini menerapkan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Analisis tematik dipilih karena fleksibilitasnya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang muncul di seluruh kumpulan data literatur yang heterogen, serta kemampuannya untuk menangani data kualitatif yang kompleks dari berbagai sumber. Proses analisis dimulai dengan familiarisasi mendalam dengan setiap teks yang terpilih, disertai pencatatan awal (*memoing*) mengenai ide-ide yang muncul terkait konstruksi identitas. Tahap berikutnya adalah pengkodean sistematis (*coding*), di mana bagian-bagian teks yang relevan dengan pertanyaan penelitian diberi label kode deskriptif dan interpretatif. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan konseptualnya untuk membentuk tema-tema potensial. Tahap krusial berikutnya adalah penyempurnaan dan penamaan tema, memastikan bahwa setiap tema secara akurat merepresentasikan makna yang terkandung dalam kumpulan kode terkait dan menjawab pertanyaan penelitian. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan komparatif yang diintegrasikan ke dalam seluruh proses analisis tematik. Hal ini berarti bahwa selama pengkodean dan pengembangan tema, perhatian khusus diberikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam dinamika konstruksi identitas budaya yang dialami oleh komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa di dalam konteks perkebunan. Perbandingan ini tidak hanya dilakukan pada level tema akhir, tetapi juga dalam proses interpretasi data, sehingga menghasilkan pemahaman yang kontras dan bernuansa tentang bagaimana ruang perkebunan beroperasi sebagai agen pembentuk identitas yang berbeda bagi masing-masing kelompok etnis (Braun & Clarke, 2006; 2019). Sintesis tematik komparatif inilah yang menjadi inti dari temuan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sub-bagian 1: Konstruksi Identitas Komunitas Aceh

Perkebunan kelapa sawit dan karet di Aceh tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai wahana rekonstruksi identitas budaya berbasis nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Penelitian Muchlis et al. (2023) di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan bahwa mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang beralih ke sektor perkebunan sawit berhasil mengintegrasikan prinsip *uleëbalang* (kepemimpinan adat) dan nilai keislaman dalam pengelolaan kebun. Kolaborasi ini memfasilitasi rekonsiliasi sosial melalui mekanisme bagi hasil lahan, kegiatan pendidikan berbasis *meunasah* (surau tradisional), dan dialog komunitas yang menekankan tanggung jawab moral menurut ajaran Islam (Muchlis et al., 2023). Kearifan lokal seperti *peusijuek* (ritual perdamaian) dan *hablum minannas* (harmoni sosial) menjadi fondasi pengelolaan kebun kolektif, memperkuat identitas keacehan yang religius dan inklusif.

Di sisi lain, konflik lahan justru memicu konsolidasi identitas etnis. Studi Nasution et al. (2024) di Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, mengungkap bahwa sengketa Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dan perusahaan sawit (PT Mopoli Raya) melahirkan solidaritas berbasis "*keacehan*". Masyarakat memobilisasi identitas kolektif melalui jaringan *gampông* (desa adat) dan lembaga *tuha peut* (tetua adat) untuk menuntut redistribusi lahan. Resistensi termanifestasi dalam aksi "Ninja"—pencurian buah sawit oleh pemuda lokal—sebagai protes terhadap ketimpangan akses ekonomi (Nasution et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik agrarian menjadi katalis bagi revitalisasi identitas etnis yang bersumber dari narasi historis perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan.

Tabel 1. Sintesis Literatur tentang Konstruksi Identitas Aceh melalui Perkebunan

Dimensi Identitas	Mekanisme Perkebunan	Dampak pada Identitas	Studi Pendukung
Religius-Islam	Integrasi nilai <i>meunasah</i> dalam CSR	Memperkuat peran ulama sebagai penjaga harmoni sosial	Muchlis et al. (2023); Yunanda et al. (2024)
Kearifan Lokal	<i>Peusijuek</i> dalam resolusi konflik	Merevitalisasi norma adat sebagai alat kohesi komunitas	Aulia et al. (2024); Akmal et al. (2023)
Solidaritas Etnis	Mobilisasi <i>gampông</i>	Mengkristalkan	Nasution et

dalam sengketa lahan	identitas "keacehan" melawan dominasi korporasi	al. (2024); Ramziati et al. (2022)
----------------------	---	--

Konflik di Aceh Timur juga mengungkap dialektika antara identitas keagamaan dan etnis. Penelitian Aulia et al. (2024) menemukan bahwa transformasi mantan anggota Darul Islam (DI/TII) menjadi pengelola perkebunan sawit berhasil mengubah stigma "pemberontak" menjadi "penjaga perdamaian". Program pemberdayaan berbasis *zakat kebun* (alokasi hasil kebun untuk sosial) dan sekolah agama di lahan HGU tidak hanya meningkatkan penerimaan masyarakat, tetapi juga memadukan identitas keislaman dengan tanggung jawab lingkungan (Aulia et al., 2024). Dengan demikian, perkebunan menjadi *site of identity negotiation*: ruang negosiasi di mana identitas Aceh yang religius, ekologis, dan resisten direkonstruksi secara dinamis.

b. *Sub-bagian 2: Konstruksi Identitas Komunitas Melayu*

Perkebunan kelapa sawit berfungsi sebagai ruang negosiasi dinamis antara nilai-nilai adat Melayu dan tekanan modernisasi. Studi oleh Rizki Yunanda et al. (2024) mengungkapkan bahwa mantan elite Darul Islam Aceh yang beralih ke perkebunan sawit tidak hanya memulihkan ekonomi pascakonflik, tetapi juga memfasilitasi rekonsiliasi sosial dengan mengalokasikan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk kegiatan pendidikan dan ekonomi komunitas. Praktik ini merefleksikan adaptasi nilai *bela kampung*—konsep pertahanan komunitas berbasis kekerabatan—dalam sistem pengelolaan perkebunan modern. Nilai tersebut termanifestasi melalui pembagian sumber daya ekonomi dan penguatan kohesi sosial, yang menjadi fondasi perdamaian di Aceh (Faizul Aulia et al., 2024).

Transformasi nilai *bela kampung* juga terlihat dalam relasi patronase di perkebunan. Gunawan et al. (2024) menunjukkan bahwa perkebunan karet dan cengkeh di wilayah Melayu mempertahankan jaringan kekerabatan tradisional dalam aktivitas panen, berbeda dengan model korporasi yang cenderung impersonal. Di Aceh Tamiang, keterlibatan masyarakat dalam skema perkebunan swadaya yang diinisiasi mantan kombatan GAM memperkuat solidaritas melalui mekanisme gotong royong dan distribusi hasil yang adil (M. Akmal et al., 2023). Namun, modernisasi juga memicu resistensi ketika nilai adat terancam. Penelitian Abdullah Akhyar Nasution et al. (2024) mendokumentasikan fenomena "Ninja"—pencurian buah sawit oleh masyarakat—sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan distribusi manfaat

perkebunan. Hal ini mengindikasikan kegagalan negosiasi antara logika kapitalis korporasi dan prinsip kolektivitas Melayu.

Tantangan utama terletak pada fragmentasi otoritas adat. Sela Azkia et al. (2025) mencatat bahwa program pemberdayaan pekerja lokal di Aceh Barat sering gagal akibat lemahnya representasi pemimpin adat dalam pengambilan keputusan korporasi. Padahal, integrasi *keuchik* (kepala desa adat) dalam struktur manajemen perkebunan terbukti meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi konflik (Rizki Yunanda et al., 2024). Dengan demikian, perkebunan sawit bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan medan pertarungan identitas tempat nilai-nilai Melayu terus diredefinisi.

Tabel 2. Sintesis Konstruksi Identitas Melayu dalam Pengelolaan Perkebunan Sawit

Aspek Identitas	Manifestasi dalam Perkebunan	Dampak	Sumber
Bela Kampung	Alokasi lahan HGU untuk kegiatan sosial; gotong royong panen	Penguatan kohesi komunitas; perdamaian pascakonflik	Rizki Yunanda et al. (2024); M. Akmal et al. (2023)
Jaringan Kekerabatan	Pelibatan pemimpin adat dalam manajemen; sistem bagi hasil berbasis keluarga	Pengurangan konflik; distribusi manfaat lebih adat	Gunawan et al. (2024); Faizul Aulia et al. (2024)
Resistensi Adat	Aksi "Ninja"; protes atas ketimpangan	Disrupsi operasi perkebunan; tuntutan restrukturisasi kebijakan	Abdullah Akhyar Nasution et al. (2024); Sela Azkia et al. (2025)

Temuan kunci menunjukkan bahwa keberlanjutan perkebunan sawit di wilayah Melayu bergantung pada pengakuan terhadap otoritas adat. Seperti disarankan Faizul Aulia et al. (2024), model *customary incorporation*—integrasi lembaga adat ke dalam tata kelola perkebunan—dapat menjadi jembatan antara modernisasi dan tradisi. Tanpa itu, perkebunan berisiko memperdalam disintegrasi sosial alih-alih memulihkan identitas kolektif.

c. Sub Sub-bagian 3: Konstruksi Identitas Komunitas Tionghoa

Perkebunan tembakau dan karet berperan krusial dalam membentuk jejaring ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia, sekaligus menjadi arena kontestasi identitas "non-pribumi". Studi Hayashi (2002) mengungkap bahwa pola *subcontracting* dalam industri perkebunan—khususnya di sektor pengolahan karet—memfasilitasi

pembentukan rantai pasok berbasis klan, di mana kelompok Tionghoa mendominasi peran sebagai pemodal dan distributor melalui jejaring *kongsi* (asosiasi dagang etnis). Sistem ini memungkinkan mobilisasi sumber daya intra-etnis, seperti pendanaan melalui *hui* (arisan investasi kolektif) dan rekrutmen tenaga kerja dari daerah asal (Hayashi, 2002). Di Karawang, misalnya, perkebunan tembakau abad ke-19 menjadi cikal bakal komunitas Tionghoa yang mengembangkan *trade enclaves* berbasis keluarga besar (Thung, 2018).

Stigma "non-pribumi" dalam kebijakan agraria membentuk strategi bertahan yang unik. Penelitian Irawan (2016) di Yogyakarta menunjukkan bahwa Instruksi Kepala Daerah DIY Tahun 1975—yang melarang warga Tionghoa memiliki Hak Milik atas tanah—memicu adaptasi melalui lembaga klan. Masyarakat Tionghoa memanfaatkan badan hukum *yayasan keluarga* untuk mengakuisisi tanah perkebunan atas nama kolektif, menghindari pembatasan individu (Irawan, 2016). Mekanisme ini tidak hanya melindungi aset, tetapi juga merevitalisasi fungsi klan sebagai penjaga identitas kultural, seperti dalam ritual *Cheng Beng* (ziarah kubur leluhur) di lahan perkebunan turun-temurun.

Tabel 3. Sintesis Literatur tentang Konstruksi Identitas Tionghoa melalui Perkebunan

Dimensi Identitas	Mekanisme Perkebunan	Dampak pada Identitas	Studi Pendukung
Jejaring Ekonomi Etnis	Sistem subcontracting dan kongsi	Memperkuat kohesi dagang intra-klan	Hayashi (2002); Thung (2018)
Strategi Hukum Klan	Akuisisi tanah via yayasan keluarga	Mentransformasi stigma menjadi solidaritas kolektif	Irawan (2016)
Adaptasi Kebijakan	Kompromi atas kebijakan kuota 60:40	Mempertahankan peran ekonomi melalui jalur informal	Fauzi et al. (2022)

Kebijakan diskriminatif seperti penerapan kuota 60% pribumi : 40% non-pribumi di sektor perkebunan Karawang (Perda No. 1/2011) justru memperkuat strategi *invisibility*. Studi Fauzi et al. (2022) menemukan bahwa komunitas Tionghoa merespons melalui:

- Alias kewarganegaraan: Menggunakan nama Indonesia untuk kepemilikan lahan.
- Simbiosis patron-klien: Bermitra dengan pengusaha pribumi sebagai "frontman".
- Lumbung sosial: Mengalokasikan sebagian hasil kebun untuk dana pendidikan klan (Fauzi et al., 2022).

Pola ini menunjukkan bagaimana identitas Tionghoa tidak tereduksi menjadi kategori "non-pribumi", tetapi mengalami *hybridization* melalui perkebunan. Sebagaimana ditegaskan Thung (2018), etnisitas Tionghoa di ruang agraria merupakan "*strategi komunikasi dinamis*" yang mengonversi keterpinggiran menjadi sumber daya ekonomi. Ritual seperti pembagian *angpao* (amplop merah) dari hasil kebun pada tahun baru Imlek, misalnya, mentransmisikan nilai *xiao* (bakti) sekaligus mereproduksi hierarki klan (Thung, 2018). Dengan demikian, perkebunan menjadi medan dialektika: di satu sisi memicu marginalisasi legal, di sisi lain memicu inovasi identitas yang resisten.

d. Analisis Komparatif

Perkebunan berfungsi sebagai medan negosiasi identitas budaya yang dinamis bagi komunitas Aceh, Melayu, dan Tionghoa di Indonesia. Meskipun ketiganya menunjukkan persamaan dalam manifestasi *agency* budaya—yakni kemampuan aktor sosial untuk merekonstruksi identitas melalui strategi adaptasi dan resistensi dalam ruang perkebunan—terdapat divergensi mendasar dalam sumber pembentukan identitas dan mekanisme sosial yang melandasinya.

a) Komunitas Aceh: Religiositas dan Rekonsiliasi

Komunitas Aceh: Religiositas dan Rekonsiliasi Pada komunitas Aceh, identitas budaya terkristalisasi melalui integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam tata kelola perkebunan. Transformasi mantan kombatan GAM dari "pejuang" menjadi "petani" dimediasi oleh praktik ekonomi yang mengadopsi prinsip *uleëbalang* (kepemimpinan adat) dan ajaran Islam, seperti mekanisme bagi hasil lahan berbasis *zakat* serta resolusi konflik melalui ritual *peusijuek* (Muchlis et al., 2023; Aulia et al., 2024). Perkebunan beroperasi sebagai *site of reconciliation*: konflik agrarian justru memobilisasi solidaritas berbasis identitas "keacehan" melalui jaringan *gampông* dan lembaga *tuha peut*, seperti terlihat dalam aksi "Ninja" sebagai bentuk resistensi terhadap ketimpangan distribusi lahan (Nasution et al., 2024). Dengan demikian, identitas Aceh bersifat religius-ekologis, di mana nilai keislaman dan tanggung jawab lingkungan menyatu dalam praktik agraris.

b) Komunitas Melayu: Adat-Teritorial dan Fragmentasi Otoritas

Bagi masyarakat Melayu, perkebunan sawit menjadi arena pertarungan antara nilai adat-teritorial dan logika kapitalis. Konsep *bela kampung* (pertahanan berbasis kekerabatan) termanifestasi dalam alokasi lahan HGU untuk kegiatan

komunal, *gotong royong* panen, serta sistem bagi hasil berbasis keluarga (Yunanda et al., 2024; Gunawan et al., 2024). Namun, modernisasi memicu disrupsi ketika otoritas adat terfragmentasi. Kegagalan program pemberdayaan akibat lemahnya representasi pemimpin adat dalam struktur korporasi (Azkia et al., 2025) memunculkan resistensi seperti aksi "Ninja"—bukti ketidakseimbangan antara kolektivitas adat dan ekspansi pasar (Nasution et al., 2024). Identitas Melayu bersifat spasial-komunal, bertumpu pada pengakuan terhadap *customary incorporation* (integrasi lembaga adat) sebagai penjaga koheesi sosial.

c) Komunitas Tionghoa: Jaringan Klan dan Strategi *Invisibility*

Komunitas Tionghoa mengonstruksi identitas melalui jejaring ekonomi klan dan strategi adaptasi terhadap kebijakan diskriminatif. Pola *subcontracting* dan *kongsi* (asosiasi dagang etnis) memungkinkan mobilisasi sumber daya intra-klan seperti pendanaan *hui* (arisan investasi) dan rekrutmen tenaga kerja sesama etnis (Hayashi, 2002; Thung, 2018). Stigma "non-pribumi" dalam kebijakan agraria (e.g., pelarangan hak milik tanah di Yogyakarta) direspons dengan inovasi hukum: akuisisi lahan via *yayasan keluarga* dan penggunaan nama lokal untuk kepemilikan lahan (Irawan, 2016; Fauzi et al., 2022). Ritual seperti *Cheng Beng* (ziarah kubur leluhur) di lahan turun-temurun atau pembagian *angpao* dari hasil kebun mereproduksi hierarki klan sekaligus mengonversi marginalisasi menjadi sumber daya ekonomi (Thung, 2018). Identitas Tionghoa bersifat hibrid-adaptif, mengombinasikan *agency* ekonomi dengan ketahanan kultural.

Tabel 4. Komparasi Konstruksi Identitas Budaya dalam Perkebunan

Dimensi	Komunitas Aceh	Komunitas Melayu	Komunitas Tionghoa
Basis Identitas	Religius-Islam (meunasah , zakat)	Adat-teritorial (bela kampung)	Jaringan ekonomi klan (kongsi)
Mekanisme Kunci	Integrasi nilai Islam dalam CSR; ritual peusijek	Gotong royong ; alokasi lahan komunal	Akuisisi tanah via yayasan; alias kewarganegaraan
Konflik Identitas	Sengketa HGU vs. solidaritas gampông	Fragmentasi otoritas adat vs. korporasi	Diskriminasi hukum vs. strategi invisibility
Dampak Utama	Rekonsiliasi pascakonflik	Resistensi adat (Nasution et al.,	Hibridisasi identitas (Thung, 2018)

(Yunanda et al., 2024)
(2024)

Perbedaan mendasar terletak pada **sumber legitimasi identitas**: Aceh mengakar pada otoritas keagamaan, Melayu pada kesatuan adat-teritorial, dan Tionghoa pada kapital sosial jejaring klan. Namun, ketiganya bersinggungan dalam penggunaan perkebunan sebagai **ruang simbolik** untuk menegosiasikan identitas di tengah tekanan modernisasi—baik sebagai medium perdamaian (Aceh), benteng resistensi (Melayu), maupun taktik adaptasi (Tionghoa). Temuan ini memperkuat tesis Bourdieu (1977) bahwa identitas adalah produk praktik sosial dalam arena ekonomi yang terus berubah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi literatur ini mengonfirmasi bahwa ruang perkebunan berfungsi sebagai site of identity negotiation—medan negosiasi kompleks tempat identitas budaya dikonstruksi melalui dialektika adaptasi dan resistensi. Pada komunitas Aceh, perkebunan menjadi medium rekonsiliasi pascakonflik di mana integrasi nilai-nilai Islam (seperti *zakat kebun* dan pendidikan *meunasah*) dan kearifan lokal (*peusijek*) mentransformasikan mantan kombatan menjadi aktor ekonomi sekaligus penjaga harmoni sosial (Muchlis et al., 2023; Aulia et al., 2024). Di wilayah Melayu, nilai *bela kampung* bertahan melalui mekanisme *gotong royong* dan alokasi lahan komunal, meski menghadapi fragmentasi otoritas adat akibat tekanan modernisasi (Yunanda et al., 2024; Azkia et al., 2025). Sementara komunitas Tionghoa mengembangkan strategi *invisibility*—seperti akuisisi tanah via *yayasan keluarga* dan penggunaan nama lokal—untuk merespons kebijakan diskriminatif sambil memperkuat kohesi klan melalui jejaring *kongsi* (Hayashi, 2002; Irawan, 2016).

DAFTAR REFERENSI

- Akmal, M., Muzaffarsyah, T., Rahman, B., Zulhilmi, Z., & Irfan, I. (2023). The economy of oil palm smallholders in post-conflict Aceh. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v39i1.2080>
- Al Qahtani, H. S. A., & Tang, K. (2019). Sustainability of oil palm plantations in Malaysia. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00458-6>
- Arifin, A., Aulia, F., Fakhrurrazi, F., Ilham, I., & Zainal, S. (2024). Conflict resolution in Aceh: A sociological study of ecological sustainability and palm oil. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v8i3.21069>

- Azkia, S., Yahya, A., Yusrizal, Ramziati, Jamaluddin, & Sastro, M. (2025). The efforts to resolve social conflicts between communities and palm oil plantation companies through the empowerment of local workers in West Aceh district. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1637>
- Baging, P. M. (2023). Changing the mindset of the indigenous Dayak community in West Kalimantan towards indigenous forests as a result of palm oil plantations. *Journal of Social Work and Science Education*, 4(1). <https://doi.org/10.52690/jswse.v4i1.521>
- Barus, B., Dharmawan, A., & Suryadi, S. (2021). Expansion and conflict at oil palm plantations: A case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Buchori, D., Hartke, T. R., Scheu, S., Hidayat, P., Nazarreta, R., & Drescher, J. (2020). Rainforest conversion to smallholder plantations of rubber or oil palm leads to species loss and community shifts in canopy ants (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News*.
- Carrasco, L., De Alban, J. D. T., Jamaludin, J., Jayathilake, H., & Webb, E. (2023). The conversion of rubber to oil palm and other landcover types in Southeast Asia. *Applied Geography*. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102838>
- Fauzi, I., Febriantini, K., & Hakim, L. (2022). Implementasi kebijakan persentase 60% pribumi dan 40% non-pribumi dalam penerimaan pekerja industri di Kabupaten Karawang. *Jurnal Manajemen*, 13(4). <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9878>
- Gunawan, Nathalia, E. P., Kartika, E., Nastiti, T., & Sholeh, M. (2024). Social relations in clove and rubber plantations. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i2.15348>
- Hardanto, A., Hölscher, D., Meijide, A., Niu, F., Röhl, A., & Hendrayanto. (2017). Oil palm and rubber tree water use patterns: Effects of topography and flooding. *Frontiers in Plant Science*, 8, 452. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00452>
- Hartke, T. R., Buchori, D., Drescher, J., Hidayat, P., Junggebauer, A., Ramos, D., Schaefer, I., & Scheu, S. (2021). Changes in diversity and community assembly of jumping spiders (Araneae: Salticidae) after rainforest conversion to rubber and oil palm plantations. *PeerJ*, 9, e11012. <https://doi.org/10.7717/peerj.11012>
- Hayashi, M. (2002). The role of subcontracting in SME development in Indonesia: Micro-level evidence from the metalworking and machinery industry. *Journal of Asian Economics*, 13(1), 1–26. [https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(01\)00110-5](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(01)00110-5)
- Irawan, R. (2016). Perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia non-pribumi untuk memperoleh kepastian hak milik. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1915>
- Kühling, M., Alamsyah, Z., & Sibhatu, K. T. (2022). Agrarian change, livelihood dynamics and welfare outcomes: Evidence from plantation crop farmers in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 306, 114864. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114864>

- Kusrini, M., Darras, K., Grass, I., Jayanto, H., Paoletti, A., & Tschardt, T. (2018). Amphibian and reptile communities of upland and riparian sites across Indonesian oil palm, rubber and forest. *Global Ecology and Conservation*, 14, e00492. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00492>
- Lan, T. J. (2018). Memahami konsep etnisitas di perkotaan: Politik inter-ruang di kota multikultural. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i3.534>
- Maraun, M., Klarner, B., Krashevskaya, V., Scheu, S., & Widyastuti, R. (2016). Changes in structure and functioning of protist (testate amoebae) communities due to conversion of lowland rainforest into rubber and oil palm plantations. *PLOS ONE*, 11(8), e0160179. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160179>
- Medrano, A. D. (2023). Plantation life: Corporate occupation in Indonesia's oil palm zone. *Journal of Asian Studies*, 82(1), 103–123. <https://doi.org/10.1215/00219118-10291033>
- Meyer, M., Barus, H., Budi, S. W., Corre, M., Edy, N., Polle, A., & Sahner, J. (2015). Degradation of root community traits as indicator for transformation of tropical lowland rain forests into oil palm and rubber plantations. *PLOS ONE*, 10(9), e0138077. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138077>
- Muchlis, Bachri, N., Fakhurrazi, F., Ilham, I., Nirzalin, N., & Yunanda, R. (2023). Strengthening reintegration through social capital: Learning from Aceh, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 95–113. <https://doi.org/10.22146/jsp.82251>
- Nasution, A. A., Aulia, F., Arifin, A., Kamil, A. I., & Nazaruddin, M. (2024). Conflict and resistance in oil palm corporation; An analysis of corporate relations, labor, and the 'ninja' phenomenon at Aceh Tamiang. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.374>
- Nurchaini, D. S., & Saputra, A. (2020). Analisis komparasi pendapatan usahatani petani konversi karet ke kelapa sawit di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. *Jurnal Agroforestry*, 3(2), 95–105. <https://doi.org/10.22437/jalow.v3i2.11615>
- Pollierer, M. M., Potapov, A., Scheu, S., Susanti, W. I., & Widyastuti, R. (2019). Conversion of rainforest to oil palm and rubber plantations alters energy channels in soil food webs. *Ecology and Evolution*, 9(13), 7343–7354. <https://doi.org/10.1002/ece3.5449>
- Ramziati, Azkia, S., Jamaluddin, Sastro, M., & Yusrizal. (2022). Social conflict resolution between communities and palm oil plantation companies through local labor empowerment in West Aceh district. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.87>
- Tawami, T., & Nugraha, P. (2020). Information system application for palm oil and rubber plantation sales. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 879, 012135. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/879/1/012135>
- Verchot, L., Aini, F., Hergoualc'h, K., Martius, C., & Smith, J. U. (2020). How does replacing natural forests with rubber and oil palm plantations affect soil respiration and methane fluxes? *Ecosphere*, 11(1), e03023. <https://doi.org/10.17528/cifor/data.00204>

- Volkova, L., Newnham, G., Sari, I. L., & Weston, C. (2021). Developing multi-source indices to discriminate between native tropical forests, oil palm and rubber plantations in Indonesia. *Remote Sensing*, 14(1), 3. <https://doi.org/10.3390/rs14010003>
- Yang, H., Ciais, P., Gong, P., Li, W., Santoro, M., Xu, Y., & Yu, L. (2022). Recent expansion of oil palm plantations into carbon-rich forests. *Nature Sustainability*, 5, 888–895. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00872-1>
- Yunanda, R., Arifin, A., Fakhurrazi, F., Ilham, I., & Suadi, S. (2024). Oil palm cultivation and peaceful social development by former Darul Islam Aceh members: A critique of the impact of HGU land management by palm oil companies. *Proceedings of the 4th International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS)*. <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2023.2343302>
- Zheng, Y., Sakwa, A., Yin, L., Zachary, M., & Zhang, X. (2020). Traditional ecological knowledge of shifting agriculture of Bulang people in Yunnan, China. *American Journal of Environmental Protection*, 9(3), 68–74. <https://doi.org/10.11648/j.ajep.20200903.13>